

Implementasi Open Door Policy dalam Menangani Pengungsi Ukraina di Jerman

Implementation of the Open Door Policy in Handling Ukrainian Refugees in Germany

Aya Sofia Wardul Muna & Takdir Ali Mukti*

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 14 Maret 2024; Direview: 29 Maret 2024; Disetujui: 08 Mei 2024

*Corresponding Email: takdiralimukti@umy.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kontribusi sebuah negara dalam menangani krisis pengungsi akibat perang dalam konteks alasan kemanusiaan. Masalah difokuskan pada studi kasus penggunaan kebijakan *open door* Jerman tentang program penanganan pengungsi Ukraina di Jerman yang diwarnai dengan pro-kontra secara internal di parlemen. Kebijakan *open door* bertujuan untuk membuka perbatasan selebar-lebarnya yang memungkinkan penerimaan pencari suaka tanpa batas. Program penanganan untuk pengungsi Ukraina tersebut meliputi *temporary protection*, integrasi pengungsi, subsidi tempat tinggal, *medical care*, dan tunjangan kesejahteraan sosial. Kerangka teoritik yang digunakan untuk mendekati masalah ini mengacu pada konsep kebijakan luar negeri. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan melalui 4 tahapan, yakni pengumpulan dan seleksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan dari pemerintah Jerman kepada pengungsi Ukraina tetap menemui tantangan berupa pendanaan yang memaksa Jerman untuk menyetujui kebijakan migrasi yang lebih ketat. Selain itu, terdapat pula diskriminasi yang terjadi antara pengungsi Ukraina dan Suriah yaitu pada kebijakan penanganan yang diberlakukan. Alasan diskriminasi paling banyak adalah karena masalah ras dan perbedaan budaya. Argumen penelitian ini bahwa dalam praktiknya latar belakang seorang pengungsi mempengaruhi pelayanan dan penanganan yang akan didapatkannya di Jerman.

Kata Kunci: Open Door Policy; Pengungsi Ukraina; Jerman.

Abstract

This article aims to explain the contribution of a country in handling with the refugee crisis due to war in the context of humanitarian reasons. The issue focuses on a case study of the use of Germany's open-door policy regarding the program for handling Ukrainian refugees in Germany which was colored by internal pros and cons in parliament. The open-door policy aims to open the borders as wide as possible to allow unlimited acceptance of asylum seekers. The handling program for Ukrainian refugees includes temporary protection, refugee integration, housing subsidies, medical care, and social welfare benefits. The theoretical framework used to approach this problem refers to the concept of foreign policy. The data in this study was collected through the literature study method through stages, namely data collection and selection, data presentation, data analysis, and conclusions. The findings of this research show that the German government's successful handling of Ukraine refugees still faces challenges in the form of funding which force Germany to agree to stricter migration policy. Apart from that, there is also discrimination that occurs between Ukrainian and Syrian refugees, namely in the handling policy implemented. The most common reason for discrimination is because of race and cultural differences. This research argues that in practice a refugee's background influences the service and treatment he or she will receive in Germany.

Keywords: Open Door Policy; Ukrainian Refugees; Germany.

How to Cite: Muna, A. S. W. & Mukti, T. A. (2024). Implementasi Open Door Policy dalam Menangani Pengungsi Ukraina di Jerman. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(4): 1497 - 1507



PENDAHULUAN

Krisis migrasi 2015 merupakan perpindahan penduduk terbesar di Eropa setelah Perang Dunia II. Menurut UNHCR, lebih dari satu juta orang datang ke Eropa melalui jalur laut. Kebanyakan dari mereka melarikan diri dari perang dan penganiayaan di negara asalnya dengan harapan mendapatkan kedamaian, keamanan dan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka di negara tujuan. Tidak semua orang yang mencari suaka ini dapat mendarat di Eropa. Sekitar 4000 pengungsi kemungkinan besar tenggelam di laut semasa perjalanan mereka ke Eropa (UNHCR, 2015). Faktor terbesar yang mendorong para pencari suaka untuk melakukan hal tersebut adalah perang saudara di Suriah, meskipun pengungsi yang datang ke Eropa berasal dari berbagai negara dan tujuan yang berbeda seperti Iraq, orang-orang Kurdis dan Palestina dari Suriah dan Afghanistan.

Krisis migrasi ini tidak selaras dengan kebijakan migrasi Uni Eropa yang belum siap untuk menghadapi gelombang pengungsi yang begitu besar tersebut. Di Jerman, kota-kota juga kewalahan dengan masuknya para pengungsi secara besar-besaran. Untuk mengatasinya diperlukan respons kebijakan yang segera di tingkat nasional karena pada saat itu tidak ada tanggapan di tingkat supranasional. Terlebih lagi, tanggapan di antara negara anggota Uni Eropa berbeda-beda, beberapa siap membantu dan menampung pengungsi, seperti Jerman. Di sisi lain, banyak yang menolak kedatangan pengungsi dan berharap mereka untuk dialihkan ke negeri lain.

Pada tanggal 25 Agustus 2015, Jerman memutuskan untuk menangguhkan "Dublin Procedure" bagi warga Suriah, yang berarti bahwa pengungsi dari negara tersebut tidak lagi harus dikirim kembali ke negara Uni Eropa yang mereka masuki pertama kali. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2015, Kanselin Jerman, Angela Merkel secara terbuka memberlakukan "Open Door Policy" atau "Kebijakan Pintu Terbuka. Keputusan ini merupakan salah satu keputusan yang paling diperdebatkan dalam politik Jerman hingga saat ini.

Pada awal tahun 2022 lalu, Jerman kembali menerima lonjakan pengungsi yang cukup besar dari negara tetangga yaitu Ukraina. Hal ini berawal dari serangan yang diluncurkan oleh Rusia kepada Ukraina tepatnya pada tanggal 24 Februari 2022 lalu (Reuters, 2023). Invasi ini memaksa sepertiga penduduk Ukraina melarikan diri ke negara-negara tetangga termasuk Jerman.

Dalam menjelaskan penelitian ini digunakan pendekatan/teori kebijakan luar negeri sebagai landasan teori. Kebijakan luar negeri adalah suatu gagasan dan pemikiran dalam membentuk suatu rancangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan atau mencapai kepentingan nasionalnya (Holsti, 1983). Dalam kebijakan luar negeri paling tidak ada tiga aspek utama, yaitu sumber atau akar dari kebijakan luar negeri, proses perumusan kebijakan luar negeri, dan tindakan pelaksanaannya. Kebijakan luar negeri ini berfungsi sebagai pedoman bagi suatu negara Ketika dihadapkan dengan kondisi internal maupun eksternal yang mengharuskan untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan (Rosenau, 1976).

Pembahasan pokok terkait respon negara Jerman terhadap krisis pengungsi 2015 menggunakan kebijakan *Open Door Policy* telah ditulis oleh (Ayoub, 2019) yang menarik kesimpulan bahwa mayoritas artikel surat kabar yang terbit selama krisis pengungsi 2015 menganggap bahwa menerima dan menampung pengungsi adalah "sebuah masalah" dengan berbagai alasan. Artikel ini juga mengatakan bahwa temuannya selaras dengan perubahan yang terjadi pada peraturan tentang pengungsi Jerman yaitu fokus pada memfasilitasi pengungsi namun membatasi masuknya pengungsi lebih lanjut.

Beberapa artikel sebelumnya, ada yang telah membahas implementasi *Open Door Policy* dalam mengelola pengungsi Suriah di Jerman. Artikel dari (Putri, Haqqi, & Alchatib, 2022) menggunakan perspektif "human security" dalam menganalisis implementasi *Open Door Policy* untuk pengungsi Suriah dimana hal tersebut berkaitan dengan keamanan ekonomi dan politik. Pengungsi yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan berpotensi untuk masuk dalam usia produktif dan bisa bekerja di Jerman. Para pengungsi juga diberi jaminan upah yang layak dan difasilitasi berbagai pelatihan yang cukup. Hal ini disampaikan oleh Angela Merkel sebagai tanggung jawab kemanusiaan. Artikel selanjutnya adalah dari (Salsabila, 2019) yang berusaha untuk melihat kebijakan *Open Door Policy* Jerman ini dari aspek pragmatisme yaitu konsiderasi isu demografi terkait grey population yang mempengaruhi perekonomian Jerman yang mana terbukti bahwa mempertahankan kebijakan *Open Door Policy* menjadi solusi untuk masalah grey population di Jerman dengan memanfaatkan pengungsi sebagai pekerja potensial. Artikel ini berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya karena bertujuan menjelaskan implementasi *Open Door Policy* dalam menangani pengungsi Ukraina di Jerman



dengan pertimbangan adanya diskriminasi antara pengungsi Suriah dan Ukraina melihat hubungan baik antara Ukraina dengan Uni Eropa, serta persamaan ras dan etnis yang dimiliki.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *Open Door Policy* dalam menangani pengungsi Ukraina di Jerman. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik diskriminasi yang terjadi antar pengungsi Suriah dengan Ukraina di Uni Eropa. Dengan tujuan ini, penelitian ini bermaksud untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait implementasi nyata kebijakan luar negeri Jerman ini dalam melaksanakan misi kemanusiaannya mengakomodasi para pengungsi Ukraina.

METODE PENELITIAN

Di lihat dari bentuk permasalahannya metode penelitian yang paling sesuai adalah menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu kondisi yang bersifat alami, dimana letak penelitian adalah sebagai instrument utama, teknik pengumpulan data dan analisis menekankan pada makna secara keseluruhan (Sugiyono, 2018). Hal ini berarti fokus penelitian kualitatif adalah pada proses dan pemaknaan hasil. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan menguraikan fenomena atau obyek penelitian dari sudut pandang penulis berdasarkan kajian pustaka yang menunjang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data sekunder berupa studi literatur yang relevan dengan topik pembahasan dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dengan studi kepustakaan penulis akan mengumpulkan dan menyeleksi data-data sekunder bersumber dari buku, surat kabar, jurnal, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik. Selanjutnya penulis akan menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang kemudian akan ditarik kesimpulan untuk dapat menjawab permasalahan yaitu implementasi kebijakan *Open Door Policy* dalam menangani pengungsi Ukraina di Jerman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Open Door Policy* di Jerman

Uni Eropa menjadi salah satu tujuan terbesar yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan atau bahaya serius di negara mereka sendiri. Memberikan suaka adalah hak dasar dan kewajiban global bagi negara-negara, seperti yang dijelaskan dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang perlindungan pengungsi. Di dalam Uni Eropa, negara-negara anggota mempertahankan nilai-nilai bersama dan strategi yang bersatu untuk memastikan tingkat perlindungan yang tinggi bagi pengungsi di area dengan perbatasan terbuka dan kebebasan bergerak. Negara-negara Uni Eropa memiliki kewajiban kolektif untuk menerima pencari suaka dengan cara yang menghormati, memberikan perlakuan yang adil dan penilaian konsisten kasus mereka berdasarkan kriteria standar. Hal ini akan menjamin bahwa tidak peduli di mana pemohon mengajukan permohonan mereka, hasilnya akan sama dan konsisten. Prosedur di Uni Eropa harus adil, efisien, dan tahan terhadap penyalahgunaan. Sebelumnya aliran suaka berfluktuasi dan tersebar tidak merata di seluruh Uni Eropa. Pada tahun 2015 lalu, lebih dari 1 juta pengungsi asal Suriah masuk daratan Eropa dan pada tahun 2022 kembali terjadi lonjakan pengungsi dari Ukraina kurang lebih mencapai lebih dari 6 juta terhitung sampai tahun 2024 (UNHCR, 2024). Uni Eropa telah mengimplementasikan *Common European Asylum System* (CEAS) sejak 1999. Pada tahun 2020, Komisi Eropa mengusulkan untuk mereformasi sistem dengan menerapkan strategi komprehensif untuk kebijakan imigrasi dan suaka yang berpusat di sekitar tiga pilar utama yaitu prosedur suaka dan pengembalian yang efisien, solidaritas dan pembagian tanggung jawab yang adil, dan memperkuat kemitraan dengan negara-negara ketiga (European Commission, 2024).

Open Door Policy merupakan bentuk dari kepatuhan Jerman terhadap *Common European Asylum System* (CEAS) yang merupakan model kebijakan penanganan pencari suaka, pengungsi dan imigran di Uni Eropa. Melalui kebijakan ini Jerman berkomitmen untuk membuka perbatasan dan memungkinkan pengungsi untuk memasuki wilayah Jerman tanpa melalui peraturan imigrasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Konstitusi Jerman memberikan suaka kepada mereka yang menjadi korban penganiayaan politik dimana penganiayaan politik ini harus datang dari negara dan harus secara spesifik dan sistematis menyasar seseorang atau kelompok. Status sebagai orang



yang berhak mendapat suaka juga tidak akan diberikan jika terdapat wilayah aman di negara asal tempat pengungsi dapat mencari keselamatan dan penghidupan. Ketika pengungsi telah diakui berhak atas suaka, pengungsi akan menerima izin tinggal yang memungkinkannya tinggal di Jerman selama tiga tahun. Jika situasi di negara asalnya tidak berubah dalam jangka waktu tersebut, izin tinggal akan diperpanjang (UNHCR, 2024).

Kebijakan ini memberikan manfaat yang besar kepada para pengungsi pada krisis imigran tahun 2015 lalu dan lonjakan pengungsi yang terjadi lagi sejak awal tahun 2022 karena adanya invasi oleh Rusia kepada Ukraina yang membuat Jerman kembali menerima jumlah kedatangan pengungsi yang besar. Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, menyerukan distribusi pengungsi Ukraina yang lebih merata di Uni Eropa dan menunjukkan solidaritas dengan menerima pengungsi (Reuters, 2022). Berbeda ketika krisis imigran 2015 lalu, negara-negara anggota Uni Eropa menerima pengungsi Ukraina ini dengan tangan terbuka.

Beberapa akomodasi dan penanganan yang diberikan oleh kolaborasi Pemerintah Jerman, Organisasi Internasional, dan organisasi nirlaba kepada pengungsi Ukraina antara lain:

1. Kemudahan dalam melintasi perbatasan

Jerman telah menjadi salah satu tujuan utama pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari konflik di negara mereka. Jerman telah menerapkan berbagai langkah untuk memudahkan akses bagi pengungsi Ukraina, termasuk menyederhanakan prosedur visa dan status perlindungan sementara (*temporary protection*). Dewan Federal Jerman (AIDA-DE, 2022) telah menyetujui keputusan terkait, sehingga pengungsi Ukraina akan dapat memperpanjang status tinggal mereka secara otomatis, tanpa perlu menyerahkan dokumen tambahan atau mengatur pertemuan dengan otoritas imigrasi. Keputusan ini didasarkan pada keputusan negara-negara Uni Eropa yang diadopsi pada akhir September 2023. Kini setiap negara Uni Eropa menegaskan status sementara bagi warga Ukraina secara terpisah, memastikan keselamatan dan akses mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan. Langkah-langkah untuk memperpanjang status pengungsi di Ukraina akan berlaku secara otomatis hingga 4 Maret 2025.

Namun, karena kemudahan akses khusus bagi pengungsi Ukraina di Jerman dapat bervariasi berdasarkan keadaan individu, seperti status hukum, dokumentasi, dan kapasitas sistem suaka Jerman secara keseluruhan. Penting bagi pengungsi Ukraina yang ingin memasuki Jerman untuk selalu mendapatkan informasi terbaru tentang kebijakan dan prosedur imigrasi terkini, yang dapat berubah seiring dengan perkembangan situasi.

2. Akomodasi dan tempat tinggal sementara bagi pengungsi

Subsidi perumahan idealnya membantu rumah tangga yang tidak mampu menemukan solusi perumahan di pasar. Idealnya, besaran subsidi sebanding dengan kebutuhan. Para ahli menganggap sistem perumahan Jerman sebagai salah satu yang terbaik di Eropa. Negara ini mempunyai (1) sektor perumahan terjangkau yang relatif besar meskipun batasan-batasan yang tidak jelas antara berbagai bentuk kepemilikan (karena alasan historis dan kelembagaan) dan (2) segmen pasar yang efisien (sistem pajak dan subsidi yang netral terhadap sewa). Namun, masalah keterjangkauan telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, terutama di pusat-pusat kota besar dengan pasar tenaga kerja yang sedang booming, dimana kebijakan perumahan telah mencoba untuk mengatasi melalui pendekatan-pendekatan baru seperti pengendalian sewa dan subsidi pasokan perumahan dari Pemerintah Federal kepada negara-negara bagian.

Pencarian solusi perumahan jangka panjang untuk Krisis Pengungsi Ukraina masih dalam tahap awal. Secara organisasi, asosiasi sosial dan amal yang sudah mapan menjadi lebih terlibat (misalnya *Paritätische*, *Caritas*, *Diakonie*, *Johanniter*, dan Palang Merah Jerman), serta berbagai lembaga negara. Solusi akomodasi dan integrasi lokal yang lebih struktural terutama melibatkan kerja efektif sistem kelembagaan kota. Dukungan finansial juga tersedia bagi inisiatif lokal untuk mengembangkan kapasitas akomodasi: misalnya, pinjaman bersubsidi untuk pemerintah kota.

Jerman telah menawarkan 300.000 rumah pribadi untuk menampung pengungsi dari Ukraina setelah invasi Rusia ke negara tersebut. Kementerian Dalam Negeri Jerman bekerja sama dengan lembaga nirlaba *gut.org* AG dan perusahaan persewaan rumah *Airbnb Inc*, untuk memberikan penawaran perumahan kepada para pengungsi. Dari sana, pengungsi akan didistribusikan ke rumah-rumah jangka panjang, di Berlin atau di tempat lain di Jerman.

Selain itu, ada juga *Helfende Wände* yang merupakan inisiatif *Wunderflats*, Kementerian Dalam Negeri dan Komunitas Federal (BMI), dan organisasi nirlaba *ProjectTogether*. Kolaborasi ini menghubungkan penyedia perumahan dengan individu yang terkena dampak konflik, membantu mereka menemukan akomodasi yang sesuai pada saat dibutuhkan. Awalnya diluncurkan sebagai proyek percontohan dalam menanggapi krisis di Ukraina, *Helfende Wände* telah membantu lebih dari 4.600 pengungsi Ukraina mendapatkan rumah sementara dan kini bertujuan untuk memberikan tempat berlindung yang aman bagi semua pengungsi saat mereka membangun kembali kehidupan mereka (Federal Office for Migration and Refugees, 2022).

3. Lapangan pekerjaan

Pemerintah Jerman telah memiliki program untuk mengintegritaskan para pengungsi. Namun karena proses yang dirasa cukup memakan waktu membuat pemerintah Jerman mengusulkan langkah-langkah untuk mempercepat integrasi puluhan ribu pengungsi Ukraina ke dalam pasar tenaga kerja, dan menyerukan perusahaan-perusahaan untuk melonggarkan persyaratan Bahasa Jerman mereka serta menawarkan pelatihan tambahan kepada para pengungsi. Dalam proses ini Pemerintah berharap mendapatkan dukungan dari perusahaan, agen tenaga kerja dan asosiasi untuk membuat komitmen sukarela, dan menunjuk perwakilan khusus dari *Federal Employment Agency* atau Badan Ketenagakerjaan Federal untuk bekerja sama dengan mereka. Hal ini dikarenakan perekonomian Jerman sangat membutuhkan tenaga kerja dan pekerja terampil. Langkah-langkah baru ini diarahkan untuk memberikan bantuan khususnya kepada puluhan ribu pengungsi Ukraina yang telah menyelesaikan atau akan menyelesaikan kursus integrasi yang ditawarkan oleh pemerintah Jerman. Setelah pengungsi menyelesaikan kursus tersebut, mereka diharapkan untuk mencari pekerjaan atau berisiko kehilangan tunjangan negara. Pusat pekerjaan dimaksudkan untuk membantu mencocokkan pekerja yang tepat dengan kualifikasi yang tepat.

Dalam sebuah langkah strategis, Menteri Tenaga Kerja, Hubertus Heil (BNN, 2023), telah mengumumkan rencana '*Job Turbo*', sebuah inisiatif yang dirancang untuk mempercepat integrasi pengungsi ke dalam angkatan kerja, setelah tahap pengujian selesai pada akhir Maret 2024, program tersebut akan tersedia secara umum. Skema ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi sekitar 400.000 individu, 200.000 di antaranya berasal dari Ukraina dan 200.000 lainnya berasal dari berbagai negara lain. Orang-orang ini telah menyelesaikan atau hampir menyelesaikan kursus integrasi. Melalui inisiatif ini, pusat pekerjaan akan mengambil peran yang lebih proaktif dalam mendorong individu untuk mulai bekerja, dengan meyakini bahwa pekerjaan adalah bentuk integrasi terbaik.

Selama dua tahun terakhir, Jerman telah menerima lebih dari satu juta pengungsi dari Ukraina dan pada akhir tahun 2023, terdapat 214.000 di antara mereka yang bekerja atau sekitar 20% (DW, 2024).

4. Medical care

Menjalani sistem layanan kesehatan dapat menjadi hal yang menakutkan bagi siapa pun, dan bagi para pengungsi dan pencari suaka di Jerman, hal ini dapat menjadi pengalaman yang sangat berat. Beruntungnya, Jerman adalah salah satu dari banyak negara yang berupaya menyediakan layanan kesehatan dan asuransi yang memadai bagi pengungsi dan pencari suaka. Di Jerman, negara menanggung biaya layanan medis bagi pengungsi dan pencari suaka melalui asuransi kesehatan masyarakat. Pengungsi atau pencari suaka dapat dengan mudah memilih dana asuransi kesehatan yang secara langsung mengganti biaya penyedia layanan kesehatan atas nama pengungsi itu sendiri.

Pengungsi Ukraina di Jerman yang telah memperoleh izin tinggal berdasarkan Bagian 24 Undang-Undang Tempat Tinggal (*Residence Act*) (§24 *AufentG*) berhak menerima perawatan medis dan asuransi melalui sistem layanan kesehatan publik (Visa Guide, 2022). Dalam hal ini, *Jobcenter* akan berkontribusi atas nama mereka dan memastikan akses terhadap layanan medis yang diperlukan. Jika pengungsi belum mendaftarkan izin tinggal, mereka tetap bisa mendapat pertolongan medis. Namun, asuransi kesehatan tidak dapat diberikan dalam situasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa setibanya di pusat pengungsian, pengungsi harus segera

menghubungi kantor kesejahteraan sosial untuk memastikan kelayakan untuk mendapatkan tunjangan medis dan bantuan yang sesuai.

Ada beberapa pelayanan Kesehatan yang diberikan khusus kepada pengungsi Ukraina oleh Pemerintah Jerman (Berlin, 2024), antara lain:

1) Layanan untuk wanita hamil, wanita dan anak perempuan

Wanita hamil yang datang dari Ukraina dan belum memiliki asuransi kesehatan dapat menjalani pemeriksaan ginekologi, atau pemeriksaan antenatal di pusat kesehatan seksual dan keluarga berencana (*Zentren für sexuelle Gesundheit und Familienplanung*).

2) Dukungan psikologis

Ada beberapa *website* dan rumah sakit yang menawarkan pelayanan psikolog gratis bagi pengungsi Ukraina seperti di *website complicated life* yang menawarkan hingga empat sesi terapi *online* gratis untuk pengungsi Ukraina. Terapis yang terdaftar memiliki bidang khusus dan berbicara dalam berbagai bahasa. Portal online ini memberi kesempatan untuk menyaring pilihan berdasarkan bahasa dan metode. Ada lagi dari Rumah Sakit St Hedwig juga menawarkan konsultasi bagi para pengungsi, yang memberikan penekanan khusus pada bantuan dalam mengatasi trauma dan pelarian diri. Selanjutnya ada *The Centre for Transcultural Psychiatry* di Vivantes menawarkan konseling psikiatri dan psikologis gratis dan terbuka bagi pengungsi dari Ukraina. Konseling ditujukan untuk anak-anak, remaja dan orang dewasa dan ditawarkan dalam bahasa ibu masing-masing (Rusia atau Ukraina)

5. *Welfare payment*/tunjangan kesejahteraan

Tunjangan Kesejahteraan Sosial (*Sozialhilfe*) tersedia bagi pengungsi yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri secara finansial dan tidak mempunyai atau memiliki pendapatan atau aset yang terbatas. Besaran Tunjangan Kesejahteraan Sosial ditentukan berdasarkan keadaan dan kebutuhan spesifik individu. Manfaat ini mungkin mencakup biaya hidup penting seperti perumahan, makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan. Pengungsi perang Ukraina berhak menerima pembayaran kesejahteraan setibanya di Jerman. "*Bürgergeld*" (pendapatan warga) ini menawarkan keamanan dasar bagi para pengangguran. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan bantuan yang diterima pengungsi dan pencari suaka lainnya.

Bantuan keuangan untuk pengungsi di Jerman disediakan oleh *Employment Center*. Jumlah standar tunjangan pengangguran bulanan adalah €449. Untuk warga negara Ukraina yang tinggal bersama keluarga, jumlahnya adalah €404. Per 1 Januari 2023, jumlah tunjangan untuk satu orang dewasa dan orang tua tunggal berhak mendapatkan €502 uang belanja bulanan. Sedangkan tunjangan anak antara €348 dan €318 setiap bulan, tergantung pada usia mereka. Negara bagian Jerman juga menanggung asuransi kesehatan dan biaya akomodasi. Dana juga disediakan untuk perabot rumah tangga dan perlengkapan sekolah (Visit World, 2023).

Dampak, Tantangan, dan Respon Terhadap Kebijakan Open Door Policy Jerman dalam Menangani Pengungsi Ukraina

Arus pengungsi di Jerman yang tinggi sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan open door policy diterapkan oleh Jerman. Kekhawatiran terhadap arus migrasi yang tidak teratur di Jerman meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan suaka, didorong oleh satu juta pengungsi Ukraina yang tiba di Jerman setelah Rusia memulai perang pada Februari 2022 lalu. Sampai saat ini Jerman telah menerima sekitar 6 juta pengungsi asal Ukraina akibat dari invasi Rusia tersebut. Jumlah pengungsi yang meningkat tajam ini menghasilkan keluhan-keluhan dari pemerintah daerah karena ketidakpuasan terhadap penanganan pemerintah federal terhadap situasi pengungsi yang semakin meningkat. Mereka juga tidak mendapat perhatian dari pemerintah federal ketika mereka berjuang untuk menampung pengungsi dan menyediakan sekolah bagi anak-anak mereka. Hal ini direspon oleh Olaf Scholz, selaku Kanselir Jerman yang menjelaskan bahwa tuntutan keuangan oleh pemerintah daerah tidak dapat dipenuhi namun menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah untuk memperlambat arus migrasi (The Telegraph, 2023).

Penanganan pengungsi yang membutuhkan pendanaan yang besar menjadikan Kanselir Olaf Scholz menyetujui kebijakan migrasi dan suaka yang lebih ketat (Reuters, 2023). Pada dasarnya kebijakan migrasi dan suaka ini telah mencapai kesepakatan politik Uni Eropa pada tanggal 20 Desember 2023 dan diadopsi formal pada awal tahun 2024 (IRC, 2023). Kebijakan itu menyetujui langkah-langkah untuk mempermudah deportase migran dan menjadikan Jerman sebagai tujuan yang kurang menarik, merombak peraturan suaka dan migrasi untuk mengurangi imigran gelap serta berupaya mencapai kesepakatan negara-negara bagian terhadap langkah-langkah tersebut dan mengatasi keluhan pendanaan pemerintah daerah. Selain itu pemerintah federal juga setuju untuk mempertimbangkan prosedur suaka ini untuk dilakukan di luar Uni Eropa. Penerapan kebijakan semacam itu telah diupayakan Uni Eropa di Afrika Utara pada krisis migrasi tahun 2015 namun gagal karena masalah hukum, keamanan, dan kemanusiaan. Namun demikian, Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser kembali melobi pemerintah Afrika untuk menyetujui kesepakatan yang akan membantu menutup kesenjangan tenaga kerja di negara tersebut, sekaligus memungkinkan Jerman untuk memulangkan migran yang datang secara ilegal (European Parliament, 2024).

Dengan persetujuan penerapan kebijakan migrasi dan suaka yang baru dengan langkah membangun pusat suaka di perbatasan luar Uni Eropa akan menjadi langkah yang menghalangi banyak pengungsi untuk menyampaikan kebutuhan mereka kepada pihak berwenang Jerman. Kebijakan ini tentu mendapat pertentangan dari kelompok hak asasi manusia salah satunya adalah *International Rescue Committee* (IRC) yang percaya bahwa Eropa mampu mengelola migrasi dan suaka secara adil dan manusiawi dan mengklaim bahwa pusat-pusat suaka tersebut akan semakin melemahkan hak-hak dasar dan perlindungan pengungsi (IRC, 2023).

Terlepas dari keputusan pemerintah federal akan perubahan kebijakan migrasi yang lebih ketat tidak bisa disangkal bahwa banyak warga Jerman yang masih mendukung penerimaan orang-orang yang membutuhkan dan masih ada dukungan yang besar untuk terus melanjutkan tanggung jawab kemanusiaan tersebut. Namun, arus pengungsi yang telah berubah drastis dari krisis 2015 tentu mempunyai pengaruh terhadap pandangan Masyarakat. Saat ini, ada keyakinan yang luas di kalangan Masyarakat Jerman bahwa jumlah korban harus dikurangi dan eskalasi di Timur Tengah maupun di Ukraina harus dihentikan. Arus migrasi yang terus meningkat telah menjadi pengingat bahwa permasalahan harus diselesaikan sampai akhirnya agar masalah migrasi tidak menumpuk di beberapa lingkungan.

Diskriminasi antara Pengungsi Suriah dan Ukraina di Jerman

Krisis pengungsi Suriah dimulai pada bulan Maret 2011 sebagai akibat dari tindakan keras pemerintah terhadap demonstrasi publik yang mendukung remaja yang ditangkap karena grafiti anti-pemerintah di kota Daraa di selatan. Penangkapan tersebut memicu demonstrasi publik di seluruh Suriah yang ditindas dengan kekerasan oleh pasukan keamanan pemerintah. Konflik dengan cepat meningkat dan negara tersebut terjerumus ke dalam perang saudara yang memaksa jutaan keluarga Suriah meninggalkan rumah mereka (UNHCR, 2023).

Hal serupa terjadi pada bulan Februari 2022, Rusia melancarkan serangan militer terhadap Ukraina, menghancurkan infrastruktur publik, memotong akses ke air, dan listrik, yang menyebabkan pengungsi Ukraina secara massal pergi ke Eropa (Reuters, 2023). Lebih dari 7 juta orang di Ukraina membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan lebih dari 6 juta orang-orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik (UNHCR, 2024). Pengungsi Ukraina menghadapi tantangan serupa rekan-rekan mereka di Suriah, memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, serta kendala Bahasa dan diskriminasi. Namun, tidak seperti pengungsi Suriah, pengungsi Ukraina mendapat perlakuan yang lebih baik dari negara-negara Eropa, sebagian karena mereka kedekatan geografis dan kesamaan budaya. Sedangkan pengungsi Suriah masih dalam bayang-bayang diskriminasi rasial dan *islamophobia* (Harvard International Review, 2022).

Standar ganda pada penanganan kedua krisis adalah pada respon kebijakan yang diberlakukan. Saat ini, pengungsi Ukraina mendapat manfaat dari penerapan Petunjuk Perlindungan Sementara (*temporary protection*) yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memungkinkan pengungsi Ukraina mendapat akses langsung untuk tinggal, mencari pekerjaan,



dan bersekolah di Uni Eropa selama tiga tahun, tanpa memerlukan persetujuan suaka resmi. Warga Ukraina menikmati persyaratan masuk yang lebih lunak. Pengungsi Ukraina tidak terlihat menerima pemberlakuan kebijakan yang akan menyulitkan sebaliknya negara yang pertama kali dimasuki akan menangani permohonan suaka dan menyediakan akomodasi. Perbedaan lain yang paling mencolok antara penanganan pengungsi Suriah dan Ukraina adalah visa/izin tinggal pengungsi Ukraina hingga 1 tahun setelah konflik walaupun pada dasarnya warga Ukraina dapat tinggal hingga 90 hari tanpa visa di Uni Eropa. Mereka bahkan dapat memasuki Slovakia dan Polandia tanpa surat-surat, Dimana Slovakia dan Polandia adalah negara-negara yang menunjukkan sentimen anti-pengungsi yang kuat selama krisis pengungsi Suriah pada tahun 2015 (Salas, 2023).

Sebelum reformasi hukum di Jerman, para penerima Petunjuk Perlindungan Sementara diberikan tunjangan sosial berdasarkan Undang-undang Tunjangan Pencari Suaka (*Asylum Seeker's Benefits Act*). Namun, mulai tanggal 1 Juni 2022, beberapa bulan setelah serangan pertama Rusia di Ukraina, para penerima Petunjuk Perlindungan Sementara berhak atas tunjangan sosial berdasarkan Kode Sosial reguler (*Social Code*). Dengan demikian mereka menerima manfaat yang sama sebagai warga negara Jerman, termasuk tunjangan pengangguran, tunjangan perumahan, layanan Kesehatan, akses lapangan pekerjaan, Langkah-langkah dukungan seperti kursus Bahasa, tunjangan anak dan orang tua, dan program dukungan Pendidikan. Hak-hak ini lebih tinggi dibandingkan dengan hak-hak berdasarkan Undang-undang Tunjangan Pencari Suaka. Hak seperti itu tidak didapatkan oleh pengungsi Suriah. Mereka juga tidak memiliki hak untuk bekerja secara legal sebagaimana pengungsi Ukraina (Karacay, 2023).

Diskriminasi lainnya adalah pada akses untuk masuk ke Jerman dimana pengungsi Ukraina diterima dengan tangan terbuka sebaliknya, pengungsi non-Ukraina diserang secara fisik oleh petugas patroli Polandia dan Belarusia, dibiarkan membeku di musim dingin, ditahan di kamp-kamp yang tidak higienis di Yunani, terjebak dalam ketidakpastian antara Polandia dan Belarusia, diserang dengan gas air mata dan meriam air di dekat perbatasan Yunani-Turki, dan dibombardir dengan retorika xenofobia dan anti-migran, terutama di Polandia, Hongaria, dan Slovakia. Uni Eropa menolak untuk mengaktifkan Petunjuk Perlindungan Sementara pada tahun 2015, memberikan insentif kepada negara-negara lain untuk menggagalkan aliran pengungsi, dan mengabaikan pelanggaran-pelanggaran oleh petugas patroli perbatasan yang melanggar hak-hak pencari suaka (Harvard International Review, 2022). Mantan Kanselir Jerman, Angela Merkel lah yang secara luas dipuji sebagai pembela hak-hak pengungsi, mendanai kamp-kamp pengungsi di Turki sehingga Presiden Erdoğan dapat menerima pengungsi Suriah pada masa itu.

Selain itu, banyak pemberitaan dari media Eropa, komentator, jurnalis dan reporter yang menggunakan istilah-istilah diskriminatif dan membuat komentar yang menyinggung ketika membandingkan pengungsi Suriah dan Ukraina. Salah satu komentar tersebut adalah tentang normalisasi terjadinya konflik di negara dengan ekonomi rendah seperti di Suriah (AMEJA, 2022). Komentar tersebut mencerminkan mentalitas jurnalisme Barat yang menormalisasi tragedi di berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin. Dalam ajang perbandingan antara pengungsi Suriah dan Ukraina ini akhirnya liputan media secara bertahap membantu mendorong dan membingkai narasi positif tentang perlunya melindungi pengungsi Ukraina karena pengungsi Ukraina dinilai serupa dengan orang-orang Eropa, berperilaku seperti orang Eropa, dan memiliki nilai-nilai budaya dan demokrasi yang mendekati nilai-nilai tersebut orang Eropa sedangkan pengungsi Suriah secara geografis, budaya, sejarah, dan agama berbeda dengan masyarakat Eropa (Salas, 2023). *Media Framing* ini pada akhirnya sedikit banyak juga mempengaruhi pembuatan kebijakan kepada pengungsi Ukraina dan semakin memperlihatkan jurang diskriminasi pelayanan kepada pengungsi Suriah pada 2015 lalu dan pengungsi Ukraina saat ini.

Menyadari tantangan yang timbul akibat penerimaan pencari suaka yang semakin tinggi Jerman meluncurkan petunjuk anti-diskriminasi untuk pengungsi dan imigran baru yang tertuang dalam Undang-undang Umum tentang Kesetaraan Perlakuan atau *the General Equal Treatment Act* (*Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz* – AGG). Undang-undang ini ini sebenarnya telah berlaku sejak 2006 namun sejak tahun 2021 Pemerintah Federal Jerman telah mengumumkan maksud

untuk mengevaluasi Undang-undang untuk memperluas cakupan penerapannya. Kemudian pada Juli 2023, Badan Anti-Diskriminasi Federal (FADA) menerbitkan proposal reformasi yang terbaru (Littler, 2023). Menurut Undang-undang Umum tentang Kesetaraan Perlakuan ini, setiap orang di Jerman mendapat perlindungan secara hukum dari diskriminasi terlepas dari status kependudukan mereka, hal ini berlaku bagi pengungsi dan imigran baru. Tujuan undang-undang ini adalah untuk mencegah atau menghentikan diskriminasi dan pelecehan langsung maupun tidak langsung berdasarkan rasa tau asal etnis, agama atau kepercayaan, usia, jenis kelamin, disabilitas, atau orientasi seksual. Undang-undang ini mengatur klaim dan konsekuensi hukum dalam 2 bidang diskriminasi; di bidang pekerjaan dan di bidang hukum perdata (Federal Anti-Discrimination Agency, 2019).

SIMPULAN

Open Door Policy yang diusung oleh Mantan Kanselir Jerman, Angela Merkel, pada 2015 lalu memberikan kabar baik dan peluang yang besar kepada para pencari suaka untuk memasuki Jerman. Kebijakan ini mengantar Jerman menjadi negara di Uni Eropa yang memberikan izin masuk terbanyak kepada pengungsi pada krisis pengungsi Suriah 2015 lalu dan krisis pengungsi Ukraina akibat invasi Rusia 2022. Pengalaman Jerman mengakomodasi pengungsi Suriah memberikan pembelajaran dan persiapan yang lebih matang bagi Jerman dalam menangani pengungsi Ukraina. Hal ini terlihat pada akomodasi dan penanganan dari kolaborasi antara pemerintah Jerman, Organisasi Internasional, dan organisasi nirlaba kepada pengungsi Ukraina yang meliputi pemberlakuan *temporary protection* untuk kemudahan melintasi perbatasan bagi pengungsi, pemberian subsidi tempat tinggal sementara, program integrasi pengungsi untuk masuk ke lapangan pekerjaan, pemberian *medical care*, dan tunjangan kesejahteraan sosial. Namun, arus kedatangan pengungsi Ukraina di Jerman yang begitu besar menciptakan masalah baru di Jerman yaitu masalah pendanaan. Dampak dan tantangan tersebut memaksa respon dari pemerintah Federasi untuk menyetujui penerapan kebijakan migrasi yang lebih ketat yang tujuannya adalah untuk memperlambat arus migrasi. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang memberikan respon positif terhadap penerimaan pengungsi. Jerman sendiri merupakan negara yang banyak berperan dalam pembuatan kebijakan di Uni Eropa dalam penyelesaian masalah pengungsi sebagai inisiator juga sebagai negositor. Penerapan kebijakan open door policy pertama kali 2015 merupakan salah satu contohnya. Di sisi lain keberhasilan Jerman dalam menangani pengungsi Ukraina memperlihatkan adanya perbedaan penanganan yang cukup kontras antara pengungsi Ukraina dan Suriah. Ketika pengungsi Ukraina saat ini mendapat sambutan yang baik serta penanganan yang cepat dan tanggap dengan diterapkannya *temporary protection* dari negara-negara Uni Eropa berbanding terbalik dengan pengungsi Suriah yang lebih banyak menolak mereka masuk ke negara Uni Eropa. Diskriminasi ini berhubungan dengan isu rasial dan *islamophobia*, dan juga peran media Eropa yang banyak memberitakan pengungsi Suriah dengan Bahasa negatif.

Rekomendasi penulis dalam hal memerangi disinformasi dan melawan xenofobia, serta mencegah bias dan stereotip yang eksplisit adalah redaksi media harus melatih reporter dan jurnalis tentang dinamika politik, budaya dan konteks yang mereka beritakan. Selain itu, redaksi media harus lebih terdiversifikasi dan merekrut reporter dan jurnalis dari berbagai latar belakang, asal usul, budaya dan agama. Hal ini harus menjadi pertimbangan yang utama karena dapat dilihat dari konten berita yang berisi ujaran negatif lebih banyak berasal dari para jurnalis Barat. Perbandingan yang tidak akurat dan menyesatkan berdasarkan standar ganda dan stereotip negatif hanya akan mengobarkan narasi beracun dan melanggengkan keputusan politik yang diskriminatif. Selain itu rekomendasi juga ditujukan kepada Komisi Eropa, dimana Komisi Eropa harus memikirkan dan merumuskan kembali kebijakan suaka yang masih melanggengkan standar ganda kepada pengungsi non-Eropa. Komisi Eropa misalnya dapat membuat badan khusus pengawasan yang bertugas mengawasi penerapan kebijakan di negara-negara anggota Uni Eropa yang bersifat independent sehingga dapat berdiri dengan bebas dan tidak terikat yang memungkinkan mereka memberikan laporan yang kredibel dan tidak memihak. Sanksi kepada negara Uni Eropa yang tidak mematuhi kesepakatan bersama juga harus mulai dipikirkan.



Sementara itu, untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis, agar memperhatikan setiap kebijakan suaka yang ada karena kebijakan suaka ini sering kali terjadi reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- AIDA-DE. (2022). *Temporary Protection Germany*. Retrieved from https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2023/04/AIDA-DE_Temporary-Protection_2022.pdf
- AMEJA. (2022). *THE ARAB AND MIDDLE EASTERN JOURNALISTS ASSOCIATION (AMEJA) STATEMENT IN RESPONSE TO COVERAGE OF THE UKRAINE CRISIS*. Retrieved from <https://www.ameja.org/resources/Documents/Ukraine%20Statement.pdf>
- Ayoub, M. A. (2019). Understanding Germany's response to the 2015 refugee crisis. *Review of Economics and Political Science*.
- Berlin. (2024). *Medical care for refugees*. Retrieved from [berlin.de: https://www.berlin.de/ukraine/en/arrive/medical-care/](https://www.berlin.de/ukraine/en/arrive/medical-care/)
- BNN. (2023). *Germany's 'Job Turbo' Initiative: A Response to Rise in Social Benefit Preference*. Retrieved from [bnnbreaking.com: https://bnnbreaking.com/politics/germanys-job-turbo-initiative-a-response-to-rise-in-social-benefit-preference/](https://bnnbreaking.com/politics/germanys-job-turbo-initiative-a-response-to-rise-in-social-benefit-preference/)
- DW. (2024). *Ukrainian refugees in Germany: Why few work for a living*. Retrieved from <https://www.dw.com/en/ukrainian-refugees-in-germany-why-few-work-for-a-living/a-68338226>
- European Commission. (2024). *Common European Asylum System*. Retrieved from Migration and Home Affairs.
- European Parliament. (2024). *Extraterritorial processing of asylum claims*. Retrieved from [europarl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/757609/EPRS_BRI\(2024\)757609_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/757609/EPRS_BRI(2024)757609_EN.pdf)
- Federal Anti-Discrimination Agency. (2019). *Protection against Discrimination in Germany A Guide for Refugees and New Immigrants*. Retrieved from [antidiskriminierungsstelle.de: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Refugees/fluechtlingsbroschuere_englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=5#:~:text=Everyone%20in%20Germany%20is%20legally,to%20defend%20themselves%20against%20discrimination!](https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Refugees/fluechtlingsbroschuere_englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=5#:~:text=Everyone%20in%20Germany%20is%20legally,to%20defend%20themselves%20against%20discrimination!)
- Federal Office for Migration and Refugees. (2022). *Accommodation and housing for refugees from Ukraine*. Retrieved from <https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-en/accommodation-for-refugees-from-ukraine/accommodation-and-housing-for-refugees-from-ukraine>
- Harvard International Review. (2022). *The Limitations of Humanity: Differential Refugee Treatment in the EU*. Retrieved from <https://hir.harvard.edu/the-limitations-of-humanity-differential-refugee-treatment-in-the-eu/>
- Holsti, K. J. (1983). *Intentional Politics, A Framework for Analysis*. London: Prentice Hall.
- IRC. (2023). *IRC Responds to EU Migration Pact: Humanitarian Leadership Urgently Needed to Ensure Humane Solutions*. Retrieved from [rescue.org: https://www.rescue.org/eu/press-release/irc-responds-eu-migration-pact-humanitarian-leadership-urgently-needed-ensure-humane](https://www.rescue.org/eu/press-release/irc-responds-eu-migration-pact-humanitarian-leadership-urgently-needed-ensure-humane)
- IRC. (2023). *What is the EU Pact on Migration and Asylum*. Retrieved from [rescue.org: https://www.rescue.org/eu/article/what-eu-pact-migration-and-asylum](https://www.rescue.org/eu/article/what-eu-pact-migration-and-asylum)
- Karacay, A. B. (2023). Temporary Protection Regimes in Türkiye and Germany: Comparing Bostanian Syrian and Ukrainian Refugee Protection Regimes. *İMGELEM*, 7 (13), 561-586.
- Littler. (2023). *What could the reform of Germany's General Equal Treatment Act (AGG) look like?* Retrieved from [littler.com: https://www.littler.com/publication-press/publication/what-could-reform-germanys-general-equal-treatment-act-agg-look](https://www.littler.com/publication-press/publication/what-could-reform-germanys-general-equal-treatment-act-agg-look)
- Putri, Y. A., Haqqi, H., & Alchatib, S. R. (2022). Assessing the Implementation of Open-Door Policy in Managing Syrian Refugees in Germany (2015). *INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH & DEVELOPMENT*, 120-126.
- Reuters. (2022). *EU countries look to share effort of hosting Ukrainian refugees*. Retrieved from [Europe: https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-refugees-should-be-distributed-across-eu-berlin-says-2022-03-28/](https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-refugees-should-be-distributed-across-eu-berlin-says-2022-03-28/)
- Reuters. (2023). *Germany's Scholz, state leader agree on tougher migration policy*. Retrieved from [reuters.com: https://www.reuters.com/world/europe/germanys-scholz-seeks-consensus-migration-stem-far-right-2023-11-06/](https://www.reuters.com/world/europe/germanys-scholz-seeks-consensus-migration-stem-far-right-2023-11-06/)

- Reuters. (2023). *Putin vows to fight on in Ukraine until Russia achieves its goals*. Retrieved from <https://www.reuters.com/world/europe/putin-tells-russians-war-ukraine-will-go-unless-kyiv-does-deal-2023-12-14/>
- Rosenau, J. N. (1976). *World Politics: An Introduction*. New York: Free Press.
- Salas, M. I. (2023). The Refugee Crisis' Double Standards: Media Framing and the Proliferation of Positive and Negative Narratives During the Ukrainian and Syrian Crises. *Policy Brief n. 129*, 1-9.
- Salsabila, N. K. (2019). Aspek Pragmatisme dalam Kebijakan Pintu Terbuka Jerman terhadap Pengungsi Timur Tengah: Solusi Grey Population. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(1), 1-16.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- The Telegraph. (2023). *Germany to ditch Angela Merkel's open-door migrant policy*. Retrieved from telegraph.co.uk: <https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/05/13/germany-ditch-angela-merkels-open-door-migrant-policy/>
- UNHCR. (2015). *Over one million sea arrivals reach Europe in 2015*. Retrieved from <https://www.unhcr.org/news/stories/over-one-million-sea-arrivals-reach-europe-2015>
- UNHCR. (2023). *Syria Refugee Crisis Explained*. Retrieved from <https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/>
- UNHCR. (2024). *Forms of Asylum and Refugee Protection*. Retrieved from Asylum in Germany: <https://help.unhcr.org/germany/asylum-in-germany/forms-of-asylum-and-refugee-protection/#:~:text=Right%20to%20asylum%20according%20to,so%2Dcalled%20safe%20third%20country.>
- UNHCR. (2024). *Ukraine Refugee Situation*. Retrieved from Operational Data Portal: <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine>
- Visa Guide. (2022). *Healthcare for Refugees and Asylum Seekers in Germany*. Retrieved from visaguide.world: <https://visaguide.world/international-health-insurance/germany/health-care-refugees-asylum-seekers/#:~:text=In%20Germany%2C%20the%20state%20covers,healthcare%20providers%20on%20your%20behalf.>
- Visit World. (2023). *Financial aid for refugees in Germany in 2023*. Retrieved from <https://visitworld.today/blog/1715/financial-aid-for-refugees-in-germany-in-2023>

